Ekonomi Makro

Ali Ibrahim Hasyim

Ekonomi Makro

Ekonomi Makro

Ali Ibrahim Hasyim

EKONOMI MAKRO
Edisi Pertama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-602-0895-49-9
ISBN (E) : 978-602-422-525-4
15 x 23 cm
xiv, 300 hlm

Cetakan ke-2, Juli 2017

Kencana. 2016.0620

Penulis
Ali Ibrahim Hasyim

Desain Sampul
tambra23

Penata Letak
@satucahayapro

Percetakan
PT Kharisma Putra Utama

Penerbit
K E N C A N A
(Divisi dari PRENADAMEDIA Group)
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, buku *Ekonomi Makro* ini dapat dirampungkan dengan baik. Sejauh ini banyak macam dan ragam buku Ekonomi Makro yang tersedia baik dalam bahasa asing, terjemahan, maupun karangan dalam bahasa Indonesia, dan mulai dari yang bersifat pengantar atau dasar, menengah, hingga bentuk lanjutan (*advance*). Materi dalam buku ini mencoba menyajikan teori ekonomi makro pada tingkat menengah (*intermediate*).

Semula buku ini adalah diktat yang diberikan kepada mahasiswa tingkat sarjana untuk memenuhi kebutuhan bahan kuliah ekonomi makro di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan tetapi terasa agak berat, sehingga tidak lagi diberikan kepada mahasiswa S-1. Dengan menambah substansi dan melengkapi berbagai kekurangannya di sana sini, maka kemudian buku ini terwujud dan telah diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana Agribisnis, Fakultas Pertanian Unila, namun dengan syarat paling tidak telah menguasai atau memahami teori Pengantar Ilmu Ekonomi.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Unila, Fakultas Pertanian Unila, dan rekan-rekan di jurusan/PS Agribisnis Unila yang telah memberi dorongan dan semangat hingga buku ini dapat terwujud. Terima kasih pula kepada Saudara Ir. Eka Kasymir, M. S. yang membantu mengoreksi kesalahan pengetikan.

Penyusun menyadari, bahwa materi buku ini masih banyak ke-

kurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan-masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan dapat dialamatkan ke: ali_ibrahim_hasyim@yahoo.co.id

Bandar Lampung, Mei 2015
Penyusun.

Dipersembahkan untuk:

Istriku: *Dra. Wirdati Moerni Ali*

Dan cucu-cucuku:

Anindya Aurelia Utami Hartanto
Adzkia Sarah Dwitania Hartanto

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

Ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, dan laju pertumbuhan output, laju inflasi, dan pengangguran; neraca pembayaran dan nilai kurs. Dalam menelaah dan mengkaji ekonomi secara menyeluruh, maka ekonomi makro memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi-kondisi: perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan, upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga, dan utang pemerintah. Dengan demikian, fokus bahasan ekonomi makro menyangkut berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual.

Ekonomi makro, *jelas* sekali merupakan subjek yang sangat penting karena menyentuh semua aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat di mana pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila porsi liputan di media masa terhadap persoalan-persoalan ekonomi makro cukup dominan sepanjang waktu. Ambil contoh misalnya peristiwa politik saat pemilihan pejabat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah atau pemilihan partai politik. Para pemilik suara dan politikus sangat menyadari pentingnya isu-isu ekonomi dalam menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan. Demikian pula isu ekonomi makro adalah penentu penting dalam hubungan internasional. Hubungan ekspor-im-

por yang melibatkan antarnegara sangat berkorelasi dengan kebijakan politik dari negara tersebut, sehingga akan berpengaruh pada kondisi perekonomiannya. Di sisi lain tidak hanya menarik karena membahas berbagai masalah penting, tetapi juga menantang karena pembahasannya dapat mengurangi perincian yang rumit tentang perekonomian ke arah hal-hal pokok yang lebih sederhana, yaitu interaksi antara *barang, tenaga kerja, dan pasar modal* dari perekonomian. Pembahasan hal-hal pokok tersebut kita harus mengesampingkan perincian perilaku unit-unit ekonomi individu, seperti rumah tangga dan perusahaan, atau proses penentuan harga di pasar tertentu, atau efek monopoli terhadap suatu pasar. Hal ini merupakan pokok bahasan dari ekonomi mikro.

Dalam ekonomi makro, kita membahas mengenai *barang* yang di analisis dalam *pasar barang* secara agregat, dengan asumsi bahwa masing-masing pasar dari barang yang berbeda—seperti pasar produk pertanian dan industri, atau yang lainnya—sebagai pasar tunggal. Sama halnya dengan *tenaga kerja*, kita membahasnya dalam *pasar tenaga kerja* secara agregat dengan mengabaikan perbedaan antara pasar, misalnya pekerja pendatang dan para dokter, atau konsultan. Pembahasan *pasar modal* secara agregat dan mengesampingkan perbedaan antara pasar surat berharga PT Sampurna, Unilever, dan/atau lukisan Affandi. Keuntungan dari abstraksi ini yaitu meningkatnya pemahaman kita mengenai interaksi pokok antarbarang, tenaga kerja, dan pasar modal. Tetapi *kelemahan* abstraksi ini yaitu terdapat sesuatu hal yang sering kali terabaikan.

Meskipun antara ekonomi mikro dan ekonomi makro memiliki perbedaan, namun sesungguhnya kedua teori tersebut tidak ditemukan pertentangan yang bersifat sangat mendasar. Dapat kita pahami, bahwa perekonomian secara agregat tidak lain merupakan penjumlahan dari pasar yang tercakup di dalamnya. Jadi, perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terutama terletak pada penekanan dan penyajiannya.

Analisis-analisis dalam teori ekonomi mikro secara umum mencakup bagian-bagian kecil dari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar merupakan bagian-bagian yang dianalisis dalam teori ekonomi

mikro, sedangkan dalam teori ekonomi makro tindakan konsumen lebih global atau kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi mikro menekankan kepada analisis membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mencapai kepuasan yang maksimum. Analisis ekonomi makro menjelaskan tentang sisi-sisi permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian, masalah-masalah utama yang dihadapi dalam setiap perekonomian, dan kebijakan serta campur tangan pemerintah dalam mengatasi ekonomi yang dihadapi.

Tabel 1.1 Perbedaan Bidang Kajian antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

No.	Bidang Kajian	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
1.	Sasaran analisis	Seorang konsumen, suatu perusahaan/industri, atau suatu pasar.	Sifatnya lebih global/menyeluruh, yaitu tindakan keseluruhan konsumen.
2.	Pilihan analisis	1. Mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Mencapai kepuasan maksimum.	1. Permintaan dan penawaran menentukan kegiatan ekonomi. 2. Masalah utama tiap perekonomian. 3. Kebijakan dan campur tangan pemerintah.
3.	Proses penentuan harga	Ditujukan pada satu industri dan industri lain dalam keadaan tertentu (*ceteris paribus*).	Mengabaikan perubahan harga relatif antar-industri yang berbeda.
4.	Total pendapatan	Pendapatan semua konsumen diasumsikan tertentu dan cara alokasinya ke barang yang ada.	Tingkat pendapatan atau pengeluaran agregat adalah variabel utama yang dipelajari.

Tinjauan mengenai proses penentuan harga di suatu industri dengan mengasumsikan harga di industri lain dalam keadaan tertentu (*ceteris paribus*) merupakan bidang kajian ekonomi mikro, sedangkan tingkat harga yang mengabaikan perubahan harga relatif antar-industri yang berbeda menjadi perhatian dalam ekonomi makro. Contoh yang lain selanjutnya, dalam ekonomi mikro mengasumsikan bahwa total

pendapatan semua konsumen dalam jumlah tertentu dan mengkaji bagaimana konsumen mengalokasikan pengeluaran tersebut terhadap berbagai barang yang ada. Sementara dalam ekonomi makro, tingkat pendapatan atau pengeluaran agregat merupakan variabel utama yang akan dipelajari. Untuk lebih mempermudah memahami perbedaan kedua teori itu secara ringkas dapat disajikan pada Tabel 1.1.

A. Aliran Pemikiran dan Pentingnya Ekonomi Makro

Perkembangan teori ekonomi makro berhubungan erat dengan masalah ekonomi yang muncul pada setiap kurun waktu. Selama masa depresi besar pada dasawarsa 1930-an telah ditemukan jalan keluarnya oleh mazhab (aliran) ekonomi Keynesian, sedangkan pada masa 1960-an terjadi masalah inflasi, maka tampillah aliran ekonomi Monetarisme yang dipimpin oleh Milton Friedman untuk mengatasi masalah tersebut. Pada masa 1980-an terjadi kekacauan ekonomi, solusinya dengan menerapkan teori ekonomi sisi penawaran (*supply-side economics*) dengan cara pemotongan pajak, tapi kemudian belum memberikan jalan keluar yang mudah, sehingga teori ini dianggap terlalu muluk.

Dalam waktu yang cukup lama, terdapat dua tradisi intelektual dalam ekonomi makro. Salah satu aliran pemikiran tersebut berpendapat bahwa pasar yang paling baik adalah pasar yang bebas dari intervensi pemerintah—menurut pandangan mazhab monetaris—sedangkan di pihak yang lain (Keynesian) yang didukung oleh Franco Modigliani dan James Tobin berpendapat bahwa intervensi pemerintah akan sangat membantu dalam mengatasi resesi ekonomi. Pada dasawarsa 1970-an, perdebatan mengenai masalah yang sama tersebut telah mendorong munculnya aliran baru para pakar ekonomi makro klasik baru (neoklasik) yang tokoh-tokohnya antara lain Robert Lucas dan Thomas Sargent. Kelompok ini tetap berpengaruh pada dasawarsa 1980-an.

Kelompok ekonomi klasik baru ini mempunyai banyak persamaan pandangan mengenai kebijakan dengan Friedman. Mereka melihat dunia sebagai suatu tempat untuk kepentingannya sendiri, perorangan bertindak secara rasional dalam situasi pasar yang menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan situasi ekonomi. Intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu hal yang memperburuk keadaan. Model

ini merupakan tantangan terhadap ekonomi makro tradisional, yang memandang perlunya intervensi pemerintah dalam mengatasi perekonomian yang dianggap menyesuaikan diri secara lamban, kaku, kurang informasi, dan mengandung tradisi sosial, sehingga menghambat pencapaian kondisi ekuilibrium pasar secara cepat.

Ekonomi makro sering dinyatakan sebagai medan perang antar berbagai aliran pemikiran yang fanatik. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat pertentangan pendapat dan bahkan teori di antara kubu-kubu yang berbeda. Oleh karena ekonomi makro berkaitan dengan dunia nyata, perbedaan yang ada tentu saja menjadi perhatian utama dalam pembahasan politis dan pers mengenai kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, dalam banyak hal terdapat pula kesepakatan umum, di samping bahwa kelompok-kelompok yang berbeda tersebut, melalui diskusi dan riset, terus mengembangkan titik temu baru serta gagasan yang lebih tajam mendekatkan letak perbedaan ini.

B. Kebijakan dan Sasaran Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang kemudian dapat dipakai untuk memengaruhi perekonomian dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) kebijakan fiskal, (2) kebijakan moneter, dan (3) kebijakan sisi penawaran. Ketiga kebijakan ini secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berada dalam wewenang DPR, dan biasanya diprakarsai oleh lembaga eksekutif pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah tarif/pajak dan pengeluaran pemerintah. Kaum fiskalis (Keynes) cenderung menginginkan peran aktif pemerintah, dan karena itu sangat ingin menggunakan kenaikan pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai perangkat kebijakan stabilitas, dan ini ditempuh dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan hal penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius.

Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga akan menaikkan pendapatan nasional dan serapan tenaga ker-

ja. Keputusan mengurangi pajak akan memberi insentif bagi masyarakat untuk membeli barang dan jasa, yang pada akhirnya pengeluaran agregat akan naik. Selanjutnya, dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui peningkatan pembelian barang dan jasa yang diperlukan maupun menambah investasi, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebaliknya, bila terjadi inflasi atau tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, langkah yang harus ditempuh yaitu mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral—untuk Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia—yang menyangkut instrumen kebijakan moneter, yaitu perubahan stok uang beredar (penawaran uang), perubahan suku bunga—tingkat diskonto—yaitu pembebanan bunga oleh Bank Sentral yang meminjamkan uang kepada bank komersial dan pengawasan terhadap sistem perbankan, yang kesemuanya dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Kaum monetaris (antara lain Milton Friedman) cenderung berpendapat bahwa jumlah uang beredar—penawaran uang—adalah determinan pokok dari tingkat harga dan kegiatan ekonomi, dan bahwa laju pertumbuhan moneter yang terlalu tinggi bertanggung jawab atas munculnya inflasi, sedangkan laju pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab terhadap fluktuasi perekonomian.

Salah satu komponen pengeluaran agregat adalah investasi (penanaman modal) oleh para pengusaha. Apabila suku bunga tinggi, maka akan mengurangi jumlah investasi dan sebaliknya investasi akan bertambah jika suku bunga diturunkan. Oleh karena itu, salah satu cara pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat yaitu dengan memengaruhi investasi. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara menaikkan jumlah pengeluaran agregat. Di sisi lain, dalam masa inflasi langkah yang perlu diambil yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga, dan dengan cara ini investasi akan turun dan disertai pengeluaran agregat juga akan turun.

3. Kebijakan Sisi Penawaran

Kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Jadi, berarti bahwa kebijakan fiskal dan moneter tersebut merupakan **kebijakan dari sisi permintaan.** Selain itu, aktivitas perekonomian suatu negara bisa juga dipengaruhi oleh sisi penawaran**.** **Kebijakan sisi penawaran** bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik.

Kebijakan sisi penawaran dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut:

(1) Kebijakan pendapatan (*incomes policy*). Kebijakan ini bertujuan terutama mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja (buruh) yang berlebihan. Pemerintah melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja, sehingga dapat menghindari tingginya biaya produksi.

(2) Meningkatkan semangat kerja para pekerja (buruh). Cara yang yang ditempuh yaitu dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga.

(3) Efisiensi kegiatan produksi. Pemerintah dapat memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam berproduksi, termasuk pengembangan mutu produksi. Insentif yang dimaksudkan di sini, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak atau pembebasan pajak.

(4) Mengembangkan infrastruktur. Pembangunan dan peningkatan mutu dan kapasitas infrastuktur jalan, jembatan, listrik, air, dan lain-lain menjadi mutlak untuk dilakukan pemerintah.

(5) Peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan usaha sektor swasta. Peraturan pemerintah yang kondusif—misalnya perizinan, fasilitas, dan lain-lain—kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya.

Pada dasarnya pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap

perekonomian tidak sepenuhnya dapat diramalkan, baik dari segi *waktu* maupun *kondisinya,* dan ini langsung berpengaruh pada permintaan dan penawaran. Dua aspek ketidakpastian ini adalah inti dari masalah kebijakan stabilisasi. **Kebijakan stabilisasi** adalah kebijakan moneter dan fiskal yang dirancang untuk memperlunak fluktuasi perekonomian, khususnya fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran.

Kebijakan ekonomi tiap negara berbeda-beda tergantung dengan sasaran atau target yang akan mereka capai. Walaupun demikian, pada umumnya sasaran-sasaran ekonomi makro merupakan opsi dari berbagai prioritas sebagai berikut:

(1) Memaksimalkan tenaga kerja dan output. Output merupakan fungsi langsung dari penggunaan tenaga kerja.

(2) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi dan besarnya bagian populasi yang memasuki pasar tenaga kerja tentu akan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar memungkinkan bertambahnya peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi hasrat/keinginan yang tidak terbatas, mendorong perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa, agar stabilitas ekonomi melalui distribusi pendapatan dapat terealisasi.

(3) Tingkat harga yang stabil. Stabilisasi harga diperlukan, karena bila terjadi fluktuasi harga yang tinggi, maka risiko ekspansi modal akan meningkat yang kemudian berdampak pada turunnya tingkat investasi dunia usaha. Pertimbangan lainnya, kontrak-kontrak tenaga kerja, tingkat bunga, berbagai ekspektasi yang diambil serta perjanjian dasar yang dilakukan perusahaan umumnya dipengaruhi oleh cepatnya perubahan harga. Karena itu stabilitas tingkat harga merupakan tujuan yang penting, sehingga fluktuasi harga akan lebih kecil dan jarang.

(4) Stabilitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran berhubungan dengan luar negeri dan cadangan devisa. Jika nilai tukar mata uang asing terus mengalami kenaikan, maka untuk mendapatkan mata uang itu diperlukan uang yang lebih banyak lagi sebagai penukarnya, artinya akan menghabiskan devisa yang diperoleh dari ekspor.

Untuk mempelajari kinerja ekonomi secara keseluruhan, maka ekonomi makro menekankan perhatiannya pada kebijaksanaan ekonomi (*economic policy*) dan variabel ekonomi yang memengaruhi kinerja suatu perekonomian. Para ekonom menggunakan banyak data dan variabel ekonomi untuk mengukur kinerja suatu perekonomian. Mereka mengumpulkan data pendapatan (*income*), harga, pengangguran, produksi, investasi, dan berbagai variabel ekonomi lainnya. Dari data tersebut diketahui, bahwa antarvariabel saling memiliki ketergantungan maupun saling memengaruhi. Contohnya, perkembangan pendapatan masyarakat akan memengaruhi kemampuan konsumsi mereka terhadap barang dan jasa. Jika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa akan semakin tinggi. Perkembangan permintaan yang tidak diimbangi penawarannya mengakibatkan harga naik, dan selanjutnya akan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Bila kenaikan permintaan tersebut diantisipasi, maka dibutuhkan investasi tambahan, karena itu pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang menggairahkan, misalnya dengan insentif suku bunga dan mengendalikan iklim usaha serta keamanan yang kondusif. Dari gambaran ini diketahui ada rangkaian hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel ekonomi makro lainnya dan bagaimana suatu kebijakan yang dijalankan akan memengaruhi variabel ekonomi yang terkait.

C. Konsep dan Hubungan Antarvariabel Ekonomi Makro

1. Produk Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto

Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah total nilai pendapatan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, termasuk yang bekerja di luar negeri pada suatu kurun waktu tertentu (biasanya tahunan). PNB merupakan ukuran pokok dari kegiatan ekonomi. Contohnya nilai PNB Indonesia mencerminkan harga pasar semua barang/jasa yang dihasilkan WNI—baik di dalam maupun di luar negeri—dan tidak menghitung produk barang dan jasa WNA yang berada di Indonesia.

Selain ukuran GNP, ada yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau G*ross Domestic Product* (GDP) yang didefinisikan

sebagai *total pendapatan yang dihasilkan semua orang baik warga negara sendiri maupun warga negara asing dari semua barang dan jasa di dalam suatu negara.* PDB mengukur nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri (domestik) tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan dalam periode tertentu. Warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Biasanya untuk negara-negara yang sedang berkembang, nilai PDB lebih besar dari nilai PNB, karena penanaman modal asing (PMA) lebih banyak daripada hasil produk warga negaranya di luar negeri. Atas dasar itu, bagi negara sedang berkembang lebih cenderung menggunakan PDB daripada PNB.

Terdapat dua ukuran PNB, yaitu PNB *nominal* dan PNB *riil*. PNB nominal mengukur barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian pada suatu periode tertentu menurut harga yang berlaku, sedangkan PNB riil mengukur output yang diproduksi pada kurun waktu tertentu menurut harga konstan tahun tertentu. Singkatnya, PNB nominal diukur menuut harga yang berlaku dan PNB riil diukur menurut harga konstan tahun tertentu (tahun dasar). Sebagai ilustrasi diperlihatkan dua ukuran PDB—kita lebih cenderung menggunakan PDB daripada PNB—di Indonesia periode 1990 hingga 2013 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2. Sebagai tahun dasar bagi pengukuran PDB riil adalah tahun 2000. Pada tahun 2000 PDB nominal sebesar Rp1.264.918,70 milyar. Dari angka-angka ini dapat diketahui rata-rata pertumbuhan ekonomi (berdasarkan PDB riil) dan PDB per kapita.

2. Inflasi dan PNB Nominal

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan PDB nominal meningkat lebih cepat daripada PDB riil. Perbedaan PDB nominal dan PDB riil ini antara lain disebabkan karena harga produk (barang-barang) meningkat, inilah yang selanjutnya dikenal sebagai **inflasi**. Laju inflasi adalah persentase kenaikan tingkat harga selama periode tertentu. Apabila laju inflasi tinggi, maka harga-harga barang meningkat. Itulah sebabnya, inflasi menjadi tidak populer karena sesungguhnya kurang dikehendaki oleh setiap orang, walaupun pendapatan meningkat seiring dengan kenaikan harga.